



Media Title	Koran Tempo		
Head Line	Pemerintah Cari Operator Tambahan		
Date	27 Feb 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	17	Article Size	
Journalist	Fery Firmansyah	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

PROYEK TOL TRANS SUMATERA

Pemerintah Cari Operator Tambahan

Maret, revisi aturan proyek ini selesai.



Penggarapan proyek jalan tol.

Fery Firmansyah
fery_f@tempo.co.id

JAKARTA — Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melanjutkan proyek jalan tol Trans Sumatera tahun ini. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, pemerintah akan mengubah rancangan peraturan presiden yang memungkinkan ada operator dan penggarap tambahan agar proyek ini bisa berjalan. "Intinya, jalan tol ini harus dibangun," kata Hatta di kantornya, kemarin.

Dalam rancangan peraturan presiden tentang jalan tol Trans Sumatera disebutkan proyek ini akan digarap PT Hutama Karya. Badan usaha milik negara yang sebelumnya berstatus perusahaan konstruksi ini akan menjadi perusahaan pembangun dan pengelola jalan tol. Meski memungkinkan ada pengelola tambahan di luar Hutama Karya, pemerintah memutuskan tidak menyerahkan penggarapan jalan tol ini kepada perusahaan swasta.

Menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Dedy S. Priatna, satu di antara tiga poin revisi rancangan peraturan presiden tentang jalan tol Trans Sumatera menyebutkan ada BUMN lain yang akan masuk dalam proyek tersebut. Rencananya, revisi aturan ini selesai pada Maret mendatang. Dengan demikian, pembangunan

(groundbreaking) proyek ini bisa dilakukan sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meletakkan jabatan, Oktober mendatang.

Pembangunan jalan tol Trans Sumatera adalah megaprojek yang sempat tertunda lantaran kesulitan pembebasan lahan dan keterbatasan anggaran. Investor swasta pun kurang tertarik pada proyek ini lantaran proyeksi pendapatannya tidak menutupi biaya yang sangat mahal. Pemerintah juga sempat hendak menunda pelaksanaan proyek yang sedianya berjalan tahun ini tersebut. Namun niat itu dipersoalkan oleh 10 gubernur di Sumatera yang ingin proyek tersebut terus berjalan.

Jalan tol Trans Sumatera nantinya menghubungkan kota besar dari Nanggroe Aceh Darussalam hingga Lampung. Empat koridor utama tol Trans Sumatera adalah Lampung-Palembang sepanjang 358 kilometer, Palembang-Pekanbaru 610 kilometer,

Pekanbaru-Medan 548 kilometer, dan Medan-Banda Aceh 460 kilometer. Sedangkan tiga koridor pendukung tol Trans Sumatera adalah jalan Palembang-Bengkulu 303 kilometer, Pekanbaru-Padang 242 kilometer, dan Medan-Sibolga 175 kilometer.

Seluruh proyek ini diperkirakan menelan dana Rp 360 triliun. Pada tahap awal, Hutama Karya akan membangun empat ruas, yakni Medan-Binjai sepanjang 16,8 kilometer dengan biaya Rp 2 triliun, Pekanbaru-Dumai 135 kilometer dengan biaya Rp 14,7 triliun, Palembang-Indralaya 22 kilometer dengan dana Rp 1 triliun, dan Bakauheni-Terbanggi Besar 150 kilometer dengan anggaran Rp 13,8 triliun.

Dana untuk proyek ini sebelumnya sudah masuk penyertaan modal negara dalam APBN Perubahan 2013. Tetapi dana sebesar Rp 2 triliun itu dipermasalahkan oleh Komisi BUMN Dewan

Perwakilan Rakyat karena tidak diajak dalam kebutuhan dana yang cukup besar. "Kami khawatir karena perlu penyertaan modal negara dan jaminan lain. Jangan sampai, jika terjadi apa-apa nanti, proyeknya terkunci," katanya.

Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmantom mengatakan tengah mematangkan isi revisi rancangan peraturan presiden tersebut. Menurut dia, ada BUMN selain Hutama Karya yang bisa menggarapnya, jika anggaran negara tidak mencukupi. Tapi Djoko ragu akan kemampuan

perusahaan pelat merah tersebut mengingat kebutuhan dananya cukup besar. "Kami khawatir karena perlu penyertaan modal negara dan jaminan lain. Jangan sampai, jika terjadi apa-apa nanti, proyeknya terkunci," katanya.

Sekretaris Perusahaan PT Hutama Karya, Ary Widiantoro, mengatakan pihaknya menunggu hasil revisi aturan dari pemerintah. Perseroan siap bekerja sama dengan

perusahaan lain dalam proyek ini. "Asalkan bukan perusahaan swasta," kata Ary kepada Tempo.

Dia berharap pemerintah memiliki strategi pendanaan lain di samping penyertaan modal negara. Sebab, Hutama Karya akan kesulitan mendanai proyek ini sendirian. "Equity harus ditambah, maka harus ada jaminan pemerintah," ujarnya.

● ANISA SUKMA MULIA | RI HENDRI |
BUMN PUTR

Tiga Poin Mengubah Tol Sumatera

Pemerintah akan mengubah Rancangan Peraturan Presiden mengenai proyek jalan tol Trans Sumatera. Ada tiga poin baru dalam aturan yang direncanakan terbit pada Maret mendatang tersebut.

1. Pemerintah akan menunjuk BUMN lain untuk menggarap proyek tersebut bersama Hutama Karya atau menunjuk BUMN pengganti jika Hutama Karya gagal.
2. Jika BUMN tidak sanggup menggarap proyek ini, pemerintah akan mengambil alih 100 persen. Pemerintah juga akan menentukan operator jalan tol ini.
3. Pemerintah menetapkan dua opsi setelah konsesi pemegang proyek berakhir, yakni pemilihan operator melalui tender atau penunjukan langsung.

● ANISA SUKMA MULIA